

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Teori Dasar Partisipasi Masyarakat

Teori dasar partisipasi masyarakat menjelaskan tentang pengertian partisipasi masyarakat, tujuan partisipasi masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah turut berperannya atau keikutsertaan seseorang dalam kegiatan tertentu. Keikutsertaan masyarakat yang didasari atas kesadaran masyarakat itu sendiri baik secara langsung ataupun tidak langsung tanpa paksaan pihak lain dapat dikatakan sebagai partisipasi (Surotinojo, 2009). Keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan sudah menjadi suatu kontribusi yang dapat diberikan dalam kegiatan tersebut. Beberapa ahli mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan seseorang atau lebih dalam suatu kegiatan yang berupa keterlibatan mental dan emosional serta kemampuan atas fisik yang dimilikinya yang dapat disumbangkan untuk mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam suatu proses perencanaan pembangunan. Sementara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan penduduk secara aktif pada setiap tahapan proses pembangunan, yaitu dalam proses pembentukan keputusan dan pengalokasian sumber-sumber, kemudian dalam pelaksanaan serta dalam pemanfaatan hasil dari program secara sukarela. Dalam Widayati (2006:59), Hoofsteede menyatakan bahwa partisipasi berarti turut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses pembangunan.

Menurut Pasaribu dan Simajuntak (dalam Fauzi, 2018:20), partisipasi masyarakat bermakna masyarakat turut ikut serta dalam pembangunan, yaitu masyarakat mengikuti dan mendampingi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Pada kenyataannya, sampai dengan saat ini pemerintahlah yang

berperan utama dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perancangan, penyelenggaraan, sampai dengan pemberi dana utama dalam pembangunan. Pada dewasa ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terlibat dalam pembangunan karena pada dasarnya pembangunan yang didanai dan diselenggarakan oleh pemerintah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.

Mubyarto dan Kartodirjo (1998:67) mengartikan partisipasi sebagai kesediaan setiap orang untuk membantu keberhasilan suatu program pembangunan sesuai dengan kemampuannya tanpa harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di suatu daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif masyarakat di daerah itu sendiri. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dari berbagai pengertian tentang partisipasi masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan melihat bagaimana keterlibatan masyarakat yang secara sukarela ikut membantu dan menyumbangkan kemampuan yang dimiliki dalam proses pelaksanaan pembangunan guna mendukung pencapaian tujuan dari pembangunan tersebut.

2.1.2 Tujuan Partisipasi Masyarakat

Menurut Conyers (1991) dalam Surotinojo (2009), terdapat beberapa tujuan dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat dapat menjadi alat untuk mendapatkan informasi terkait kondisi, kebutuhan masyarakat, serta tanggapan masyarakat terhadap pembangunan karena tanpa adanya informasi tersebut akan membuat program pembangunan yang dilaksanakan tidak berhasil.
- b. Partisipasi masyarakat akan membuat masyarakat lebih percaya terhadap program yang dilaksanakan karena mereka dilibatkan dalam proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat akan membuat masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.

- c. Dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan akan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan hanya sebagai objek pembangunan saja seperti yang terjadi selama ini.

Sedangkan menurut Henry Sanoff (2009) dalam Surotinojo (2009), pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan yaitu bertujuan untuk hal-hal berikut, yaitu:

- a. Pelibatan masyarakat dalam suatu tahapan pembangunan yaitu pada tahap proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap kelompok tertentu. Apabila telah muncul rasa percaya dalam masyarakat, maka masyarakat akan menerima semua keputusan serta rencana yang ditetapkan. Hal tersebut juga akan membuat masyarakat menjalankannya dengan rasa penuh tanggung jawab.
- b. Adanya pelibatan masyarakat dalam suatu pembangunan dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan yang dilaksanakan diterima dengan baik oleh masyarakat.
- c. Pelibatan masyarakat dapat meningkatkan rasa akan memiliki dalam masyarakat.

2.1.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat ada yang bersifat material dan non-material. Bentuk partisipasi bersifat material yaitu berupa barang dan uang, sedangkan yang bersifat non-material yaitu berupa tenaga, pikiran atau ide, dan pengambilan keputusan. Keith Davis (dalam Sastropetro, 1998:16) mengemukakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yaitu berupa pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan uang. Surotinojo (2009) dalam Anggara (2020) menjelaskan bentuk partisipasi yang dapat diberikan dalam suatu perencanaan pembangunan, yaitu berupa:

1. Pikiran

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan terlibat secara aktif dalam pertemuan atau diskusi yang diadakan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan.

2. Tenaga

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga dalam kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

3. Keahlian

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan ikut membantu dalam proses pembangunan dengan menerapkan keahlian yang dimiliki atau mereka dapat berbagi ilmu kepada orang lain agar ilmu atau keahlian tersebut dapat diterapkan dalam pembangunan.

4. Barang dan Uang

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberi sumbangan berupa uang atau barang yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

Menurut Ericson (2001) dalam Slamet (1994) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Tahap perencanaan, dalam tahap ini partisipasi yang dimaksud adalah seseorang terlibat dalam penyusunan rencana serta strategi dalam menyusun kepanitiaan dan penyusunan anggaran dari suatu program. Pada tahap ini, melalui pertemuan yang diadakan masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara memberikan usulan, saran, serta kritik terhadap program yang direncanakan.
- b. Tahap pelaksanaan, dalam tahap ini partisipasi yang dimaksud adalah seseorang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan suatu program. Pada tahap ini, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan tenaga, uang, material/barang, serta ide pada pekerjaan program tersebut sebagai salah satu wujud dari partisipasinya,
- c. Tahap pemanfaatan, dalam tahap ini partisipasi yang dimaksud adalah seseorang terlibat dalam pemanfaatan suatu program setelah program tersebut selesai dikerjakan. Pada tahap ini, masyarakat dapat memberikan partisipasi berupa tenaga dan uang untuk keperluan pengoperasian dan pemeliharaan program.

Sementara Sutami (2009) dalam Septiana (2016) menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam tahap pembangunan, yaitu:

- a. Tahap perencanaan, partisipasinya meliputi keaktifan dalam menghadiri pertemuan, menyampaikan usulan, dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

- b. Tahap pembangunan, partisipasinya meliputi tenaga, uang, material /barang, pikiran, dan keahlian.
- c. Tahap pengawasan, partisipasinya meliputi daya guna hasil pembangunan dan kesesuaian bentuk prasarana yang dibangun dengan rencana yang telah dibuat.

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Surotinojo (2009) terdapat 2 jenis faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi, sedangkan faktor eksternal yaitu peran aparat dan lembaga formal yang terlibat. Adapun uraian dari masing-masing faktor yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri baik dari setiap individu ataupun kelompok yang ada didalamnya. Menurut Slamet (1994) dalam Chaerunnissa (2014), perilaku individu ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan.

1. Usia

Perbedaan usia dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut Soedarno dkk (1992) dalam Surotinojo (2009), perbedaan usia dalam masyarakat akan memunculkan kelompok umur tua dan kelompok umur muda dimana terdapat perbedaan kedudukan dan derajat antar kedua kelompok tersebut, misalnya dalam menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan. Kelompok umur tua dalam hal ini dianggap lebih memiliki banyak pengalaman, sehingga akan lebih berperan dalam memberikan pendapat dan pengambilan keputusan.

2. Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Partisipasi yang diberikan oleh laki-laki akan berbeda dengan perempuan. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan. Soedarno dkk (1992) dalam Surotinojo (2009) mengatakan bahwa laki-laki memiliki hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh perempuan,

sehingga dalam hal ini kelompok laki-laki akan cenderung lebih banyak berpartisipasi.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena semakin tinggi pendidikan maka semakin luas juga pengetahuan tentang pembangunan dan partisipasi.

4. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan berkaitan dengan pendapatan seseorang, maka jenis pekerjaan dapat mempengaruhi bentuk partisipasi masyarakat misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya. Hal itu dikarenakan jenis pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang yang dimiliki. Budiharjo (1991) dalam Surotinojo (2009) menyatakan bahwa apabila masyarakat sudah disibukkan oleh pekerjaannya, maka mereka akan kurang tertarik untuk menghadiri pertemuan dan sebagainya.

5. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan cukup erat hubungannya dengan partisipasi masyarakat, karena banyak dari masyarakat yang berpenghasilan besar memilih untuk berpartisipasi dalam bentuk uang dibandingkan tenaga. Sementara masyarakat yang berpenghasilan rendah, lebih memilih untuk berpartisipasi dalam bentuk tenaga dibandingkan uang.

Sedangkan, menurut Plumer (dalam Surotinojo, 2009) beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat diantaranya adalah:

1. Pengetahuan dan Keahlian

Pengetahuan dan keahlian dapat membuat masyarakat memahami akan tahap pembangunan dan bentuk partisipasi yang diberikan, begitupun sebaliknya.

2. Pekerjaan

Pekerjaan masyarakat akan berpengaruh terhadap waktu luang yang tersedia untuk digunakan dalam berpartisipasi pada suatu pembangunan. Dengan tingkat pekerjaan tertentu dapat membuat masyarakat lebih meluangkan atau tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi.

3. Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf

Tingkat pendidikan dan buta huruf sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Faktor ini juga berpengaruh dalam masyarakat memahami dan melaksanakan bentuk partisipasi yang ada.

4. Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin akan mempengaruhi keinginan serta kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Perbedaan jenis kelamin akan menimbulkan persepsi dan pandangan yang berbeda terhadap suatu permasalahan yang dalam hal ini adalah partisipasi dalam proyek pembangunan berbasis masyarakat.

5. Kepercayaan terhadap Budaya Tertentu

Semakin tinggi heterogenitas masyarakat terutama dalam hal agama dan budaya akan mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena sering terjadi pertentangan antara kepercayaan dengan konsep pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Cohen, J. and Uphoff (1977) dalam Nurbaiti dan Bambang (2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, etnis, agama, pekerjaan, tingkat pendapatan, dan jarak rumah. Sementara menurut Mulya, et al. (2016) menyebutkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Usia

Usia mempengaruhi seseorang dalam memutuskan pilihan apakah mau berpartisipasi dalam suatu pembangunan. Kelompok yang tergolong dalam kelompok usia menengah ke atas cenderung lebih banyak terlibat dalam suatu kegiatan dibandingkan kelompok usia yang lain.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dianggap dapat berpengaruh terhadap sikap seseorang untuk menentukan ikut terlibat atau tidak dalam suatu pembangunan.

3. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk uang karena pada umumnya kejadian yang ditemukan di lapangan masyarakat yang relatif kaya cenderung memilih ikut berpartisipasi dengan

membayar uang daripada melakukan kerja fisik atau berpartisipasi dalam bentuk tenaga. Sedangkan, penduduk yang miskin cenderung memilih untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga.

4. Lama Tinggal

Faktor lama tinggal dianggap memiliki pengaruh terhadap keterpanggilan seseorang untuk terlibat dalam suatu proyek pembangunan. Faktor ini akan menjadikan seseorang lebih adaptif dan cepat terpanggil untuk ikut berpartisipasi. Semakin lama seseorang tinggal dalam suatu desa akan memperluas pemahaman serta wawasannya mengenai nilai dan norma yang berlaku di desa tersebut.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu berasal dari pihak terkait yang berkepentingan dan berpengaruh dalam program yang dilaksanakan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak yang memiliki pengaruh sangat signifikan dalam mensukseskan program pembangunan yang dilaksanakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Surotinojo (2009), berdasarkan hasil penelitiannya Surotinojo menyimpulkan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah peran pemerintah, tokoh masyarakat, pengurus desa/dusun, dan faktor peran konsultan/fasilitator.

Dari pernyataan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi terdiri dari dua jenis yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor yang tergolong dalam faktor internal meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, pengetahuan dan keahlian, serta kepercayaan terhadap budaya tertentu. Sedangkan, yang tergolong dalam faktor eksternal meliputi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pengurus desa/dusun, dan konsultan/fasilitator.

2.2 Pelaksanaan Program PAMSIMAS

Program PAMSIMAS merupakan program AMPL-BM (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat) di Indonesia yang menjadi program

berbasis masyarakat andalan dalam solusi penyediaan sarana air minum serta sanitasi di kawasan perdesaan. PAMSIMAS diadakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang sesuai standar bagi masyarakat di wilayah perdesaan.

PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan akses bagi penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum serta sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat (PAMSIMAS, 2020). Layanan air minum dan sanitasi ini diperuntukkan bagi masyarakat di perdesaan yang berpenghasilan rendah. Secara rinci tujuan dari program PAMSIMAS adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan praktik perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat
2. Untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan
3. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dalam penyelenggaraan program pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
4. Untuk meningkatkan keefektifan dan kesinambungan yang berjangka panjang dari program pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program PAMSIMAS (2020), ruang lingkup program PAMISMAS terdiri atas:

1. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal
2. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kesehatan
3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum
4. Hibah insentif untuk desa/kelurahan dan Kab/Kota
5. Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program

PAMSIMAS merupakan salah satu program pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang dalam seluruh pelaksanaan dan pengelolaannya menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. PAMSIMAS menggunakan pendekatan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga dengan berbasis pada TUPOKSI. Program PAMSIMAS merupakan program bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Pemerintah Kabupaten berperan sebagai pemegang kebijakan dalam pemilihan desa sasaran serta berperan sebagai pihak yang berkolaborasi dalam berbagai program air minum dan sanitasi yang ada di wilayah kabupaten. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk memastikan percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi.
3. Pendekatan Berbasis Masyarakat, yaitu masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan dari sarana air minum dan sanitasi yang dibangun.

Adapun prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan program PAMSIMAS adalah sebagai berikut:

1. Tanggap Kebutuhan, prinsip ini menjelaskan bahwa program PAMSIMAS hanya diberikan kepada desa/kelurahan yang membutuhkan dan bersedia untuk memelihara serta mengelola program yang telah dibangun. Hal tersebut dikarenakan alokasi dana yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat.
2. Partisipatif, yaitu dalam pelaksanaan program menekankan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. Seluruh masyarakat baik yang miskin, kaya, perempuan, laki-laki, ataupun tua dan muda harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan agar pembangunan dapat berhasil.
3. Kesetaraan Gender, setiap masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan berkesempatan sama untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan program PAMSIMAS.
4. Keberpihakan pada Masyarakat Miskin, artinya program ini memastikan masyarakat miskin di perdesaan akan mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman.
5. Akses bagi Semua Masyarakat, yaitu memastikan seluruh masyarakat di perdesaan akan mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang layak serta berkelanjutan termasuk masyarakat yang berkebutuhan khusus.

6. Perlindungan pada Anak, artinya pelayanan air minum dan sanitasi yang dibangun dipastikan ramah anak dan mudah untuk dimanfaatkan oleh anak-anak.
7. Keberlanjutan, program PAMSIMAS yang dibangun harus keberlanjutan artinya dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara terus menerus.
8. Transparansi dan Akuntabilitas, seluruh pelaku program PAMSIMAS berhak mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan program PAMSIMAS. Artinya, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Berbasis Nilai, yaitu seperti kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan gotong royong harus menjadi landasan dalam program PAMSIMAS yang diselenggarakan.

Program PAMSIMAS telah menjadi program yang berhasil meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak. Program PAMSIMAS sudah dilaksanakan sejak tahun 2008-2012 yaitu tahap I dan dilanjutkan dengan PAMSIMAS tahap II dari kurun waktu 2013-2015. Dari program PAMSIMAS tahap I dan II telah berhasil menambah akses air minum aman dan sanitasi layak bagi 10,4 juta jiwa pada 12.000 lebih desa/kelurahan yang tersebar di 233 Kabupaten/Kota di 32 Provinsi di Indonesia. Program PAMSIMAS saat ini sudah memasuki tahap III yang dilaksanakan pada kurun waktu 2016-2020. Pada tahap III ini pelaksanaan program PAMSIMAS akan menysasar 15.000 desa sasaran baru serta mendampingi keberlanjutan program pada kurang lebih 27.000 desa peserta PAMSIMAS di seluruh Indonesia (PAMSIMAS, 2020).

2.2.1 Landasan Yuridis Pemberdayaan Program PAMSIMAS

Terdapat berbagai kebijakan dan peraturan yang menjadi bingkai dalam program pembangunan desa di bidang kesehatan dan penyehatan lingkungan seperti PAMSIMAS. Kebijakan dan peraturan tersebut diantaranya:

1. UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
2. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. PP 72, 73 Tahun 2005 tentang Desa/Kelurahan

4. Surat Edaran Bersama MENEG Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Mendagri No. 1181/M.Ppn/02/2006 dan 050/244/Sj Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006.
5. Surat Mendagri No. 414.2/2435/Sj Perihal Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Perpres No.7 Tahun 2005)
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Strategis Propinsi dan Rencana Strategis Kabupaten/Kota.

2.2.2 Faktor Penghambat atau Kendala

Faktor penghambat adalah hal-hal dapat menghambat bahkan menghentikan suatu kegiatan. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program PAMSIMAS (2020), disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat atau kendala dalam pengelolaan PAMSIMAS, yaitu meliputi:

1. Belum memadainya dukungan program dan anggaran daerah yang berfokus pada peningkatan kinerja pelayanan air minum serta sanitasi perdesaan berbasis masyarakat
2. Belum sinkronnya perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan berbagai program dan anggaran untuk air minum dan sanitasi perdesaan
3. Belum memadainya pemanfaatan pendanaan dari sumber lainnya bagi sistem penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat
4. Belum optimalnya lembaga yang menangani pengelolaan air minum dan sanitasi di perdesaan
5. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi air minum dan sanitasi perdesaan untuk menjadi bagian dari sistem informasi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai basis pengambilan keputusan program dan anggaran pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan.

2.3 Partisipasi Masyarakat dalam Program Berbasis Masyarakat

Saat ini paradigma pembangunan yang sebelumnya lebih memfokuskan kepada pembangunan ekonomi sudah mulai ditinggalkan. Paradigma tersebut

ditinggalkan karena tidak dapat memberi jawaban dari berbagai permasalahan sosial yang dihadapi seperti kemiskinan, kesenjangan, dan keterbelakangan. Secara dinamis, dari masa ke masa paradigma pembangunan mulai bergeser ke arah pembangunan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Dimana sebelumnya masyarakat berperan sebagai objek, saat ini berganti peran menjadi subjek dalam pembangunan.

Dalam Muttofi'ah (2020), Hoofsteede menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan artinya terdapat suatu proses tindakan dari masyarakat pada suatu kegiatan pembangunan. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan. Keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sudah dapat dianggap sebagai partisipasi.

Dalam paradigma pembangunan ini, perencanaan partisipatif dianggap sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan. Perencanaan partisipatif bukan untuk menghasilkan rencana yang tetap tetapi lebih ke membentuk ruang untuk diskusi dari para aktor dalam pembangunan. Ruang dialog tersebut nantinya akan membahas mengenai berbagai harapan, persepsi, serta interpretasi mengenai persoalan serta isu yang sedang diperbincangkan. Selain itu, perencanaan partisipatif juga menjadi ruang interaksi antara teknisi dengan anggota komunitas agar dapat saling berbagi berbagai pengetahuan yang mereka miliki (De Roux, 1998 dalam Sawitri, 2006).

Suatu perencanaan yang berbasis masyarakat merupakan suatu perencanaan yang secara keseluruhan mencerminkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat karena dalam proses penyusunannya melibatkan masyarakat (Abe, 2005). Dampak dari terlibatnya masyarakat secara langsung dalam suatu proses perencanaan pembangunan diantaranya adalah terhindar dari kemungkinan terjadinya manipulasi dan memperjelas apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan pembangunan karena semakin banyak masyarakat yang terlibat maka akan lebih baik, serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan proses politik masyarakat. Oleh karena itu, peran serta masyarakat harus dibentuk dan digerakkan

agar dapat berfungsi sebagai *output* atau keluaran dari pembangunan yang dilaksanakan. Menurut Ndraha (1990) dalam Muttofi'ah (2020) dari hal tersebut dapat diketahui bagaimana perkembangan keadaan taraf hidup masyarakat, serta kemampuan masyarakat tersebut untuk mandiri

Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting yang harus dilibatkan. Partisipasi masyarakat dapat membuat masyarakat lebih menerima dan mengapresiasi terhadap program yang dilaksanakan. Sehingga, hal ini akan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pemeliharaan dengan baik dan akan memunculkan rasa kebanggaan tersendiri atas apa yang dibangun. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan dan pengelolaan. Schubeler (1996) dalam Muttofi'ah (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dapat berpengaruh terhadap kualitas serta kelancaran prasarana yang disediakan.

Melihat hal tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan khususnya pembangunan sarana dan prasarana perdesaan sudah menjadi suatu keharusan. Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan dari sarana dan prasarana tersebut dapat berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan suatu program dengan pendekatan berbasis masyarakat tidak hanya ditinjau secara administratif saja apakah sudah sesuai dengan pedoman petunjuk teknis. Tetapi, harus ditinjau juga secara substansi yaitu memastikan program tersebut berkelanjutan, dimana program tersebut dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus oleh masyarakat. Suatu program pembangunan dapat bertahan lama, jika pembangunan program tersebut memang yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, bermanfaat dan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah/ lembaga bertugas untuk mendorong, memotivasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kemandirian. Suatu program dengan pendekatan berbasis masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila kegiatan program pembangunan tersebut dapat berkembang dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Salah satu program dengan pendekatan berbasis masyarakat adalah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Berdasarkan pendapat Conyers (1991) dalam Miranda Asmara (2020), terdapat beberapa hal yang membuat partisipasi masyarakat sangat penting dalam program pembangunan yang memiliki pendekatan berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS. Pertama, partisipasi masyarakat menjadi salah satu media dalam mendapatkan informasi terkait kondisi, kebutuhan, serta perilaku masyarakat setempat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, program pembangunan tidak akan berhasil. Kedua, dengan melibatkan masyarakat maka akan membuat masyarakat menjadi lebih percaya terhadap program yang dilaksanakan, karena hal tersebut membuat mereka lebih mengetahui terkait program yang dilaksanakan secara keseluruhan sehingga akan memunculkan rasa memiliki terhadap program tersebut. Ketiga, dengan melibatkan masyarakat maka akan memberikan hak demokrasi dari masyarakat itu sendiri.

2.4 Sintesa Penelitian

Dalam menentukan sintesa penelitian ini dibutuhkan teori-teori dari penelitian terdahulu, teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, serta sumber lainnya terkait bentuk partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program PAMSIMAS. Terdapat 3 (tiga) tahap yang dilakukan dalam menentukan variabel penelitian yaitu tahap identifikasi variabel, verifikasi variabel, dan penetapan variabel.

2.4.1 Identifikasi Variabel

A. Identifikasi Variabel Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pada tahap ini akan dilakukan pengelompokan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang ada. Variabel akan dinilai berdasarkan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan keadaan di lokasi penelitian. Berikut adalah kumpulan variabel yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan sumber.

TABEL II.1
IDENTIFIKASI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

| No. | Bentuk | Sumber | | | |
|-----|--------------------------------------|--------|---|---|---|
| | | A | B | C | D |
| 1. | Pikiran | √ | √ | | √ |
| 2. | Tenaga | √ | √ | √ | √ |
| 3. | Keahlian | √ | √ | | √ |
| 4. | Barang atau material | √ | √ | √ | √ |
| 5. | Uang | √ | √ | √ | √ |
| 6. | Usulan/pendapat, saran, serta kririk | | | √ | √ |
| 7. | Ide-ide | | | √ | |
| 8. | Terlibat dalam pengambilan keputusan | | | | √ |
| 9. | Keaktifan menghadiri pertemuan | | | | √ |
| 10. | Melakukan perawatan | | | | √ |
| 11. | Tanggung jawab dalam pengoperasian | | | | √ |

Sumber: A. Keith Davis (dalam Sastropetro, 1998)

B. Surotinojo (2009) dalam Anggara (2020)

C. Menurut Ericson (2001) dalam Slamet (1994)

D. Sutami (2009) dalam Septiana (2016)

Dalam penelitian ini variabel bentuk partisipasi masyarakat yang akan diidentifikasi terdiri atas tiga variabel yaitu bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan. Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan meliputi: keaktifan menghadiri pertemuan, menyampaikan usul/pendapat, dan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan. Sementara bentuk partisipasi dalam tahap pelaksanaan meliputi: pikiran, tenaga, keahlian, barang dan uang. Sedangkan bentuk partisipasi dalam tahap pemanfaatan meliputi: melakukan perawatan dan tanggung jawab dalam pengoperasian. Berikut adalah tabel kajian bentuk partisipasi masyarakat.

TABEL II.2
KAJIAN BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

| No. | Variabel | Sub-Variabel | Tolak Ukur |
|-----|----------------------|---|--|
| 1. | Tahap Perencanaan | Keaktifan menghadiri pertemuan | Masyarakat turut aktif dalam menghadiri pertemuan terkait rencana program |
| | | Menyampaikan usul atau pendapat | Masyarakat turut aktif dalam menyampaikan usul atau pendapat |
| | | Keikutsertaan dalam pengambilan keputusan | Masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait program yang akan dilaksanakan |
| 2. | Tahap Pembangunan | Tenaga | Masyarakat memberikan bantuan tenaga dalam program yang dilaksanakan |
| | | Uang | Masyarakat memberikan bantuan berupa uang dalam program yang dilaksanakan |
| | | Barang atau material | Masyarakat ikut memberikan bantuan berupa barang atau material dalam kegiatan program yang dilaksanakan |
| | | Pikiran | Masyarakat memiliki ide atau inisiatif dalam kegiatan program yang dilaksanakan |
| | | Keahlian | Masyarakat menggunakan keahlian yang dimiliki untuk ikut dalam kegiatan program yang dilaksanakan (masyarakat memberikan sumbangan dalam bentuk kerja) |
| 3. | Tahap Pemanfaatan | Melakukan Perawatan | Masyarakat memberikan bantuan berupa uang atau tenaga untuk keperluan perawatan prasarana |
| | | Tanggung jawab dalam pengoperasian | Masyarakat bertanggung jawab dalam mengoperasikan prasarana |

Sumber: A. Keith Davis (dalam Sastropetro, 1998)

B. Surotinojo (2009) dalam Anggara (2020)

C. Menurut Ericson (2001) dalam Slamet (1994)

D. Sutami (2009) dalam Septiana (2016)

B. Identifikasi Variabel Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Pada tahap ini akan dilakukan pengelompokan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan teori-teori yang ada. Variabel akan dinilai berdasarkan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan kondisi terkini di lokasi penelitian. Berikut adalah kumpulan variabel secara keseluruhan yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan sumber.

TABEL II.3
IDENTIFIKASI FAKTOR

| No. | Faktor | Sumber | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E |
| 1. | Usia | √ | | √ | √ | |
| 2. | Jenis kelamin | √ | √ | √ | | |
| 3. | Tingkat pendidikan | √ | √ | √ | √ | |
| 4. | Jenis pekerjaan | √ | √ | √ | | |
| 5. | Tingkat pendapatan | √ | | √ | √ | |
| 6. | Pengetahuan dan keahlian | | √ | | | |
| 7. | Buta huruf | | √ | | | |
| 8. | Kepercayaan terhadap budaya tertentu | | √ | | | |
| 9. | Etnis | | | √ | | |
| 10. | Agama | | | √ | | |
| 11. | Jarak rumah dengan lokasi kegiatan | | | √ | | |
| 12. | Lama tinggal | | | | √ | |
| 13. | Peran pemerintah | | | | | √ |
| 14. | Tokoh masyarakat | | | | | √ |
| 15. | Pengurus desa/dusun | | | | | √ |
| 16. | Konsultan/fasilitator | | | | | √ |

Sumber: A. Slamet (1994) dalam Chaerunnissa (2014)

B. Plumer (dalam Surotinojo, 2009)

C. Cohen, J. and Uphoff (1977) dalam Nurbaiti dan Bambang (2017)

D. Mulya, et al. (2016)

E. Surotinojo (2009)

2.4.2 Verifikasi Variabel

Dari berbagai variabel yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian akan diverifikasi untuk mengeliminasi faktor yang kurang sesuai dengan penelitian ini serta memberi justifikasi atau alasan pemilihan variabel. Setelah diverifikasi dan diberi justifikasi maka akan diketahui variabel apa saja yang akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program PAMSIMAS.

TABEL II.4
VERIFIKASI VARIABEL FAKTOR

| No. | Faktor | Keterangan | Justifikasi | Verifikasi |
|-----|--------------------|------------|--|---|
| 1. | Usia | Dipilih | Menurut Soedarno dkk (1992) dalam Surotinojo (2009), perbedaan usia akan memunculkan kelompok umur tua dan kelompok umur muda dimana terdapat perbedaan kedudukan dan derajat antar kedua kelompok tersebut, misalnya dalam menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan. Kelompok umur tua dalam hal ini dianggap lebih memiliki pengalaman, sehingga akan lebih banyak memberikan pendapat dan mengambil keputusan. | Dipilih menjadi faktor yang dianalisis sebagai variabel usia |
| 2. | Jenis kelamin | Dipilih | Menurut Plumer (dalam Surotinojo, 2009), jenis kelamin akan mempengaruhi keinginan serta kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Banyak yang menganggap perbedaan jenis kelamin akan menimbulkan persepsi dan pandangan yang berbeda terhadap suatu permasalahan. | Dipilih menjadi faktor yang dianalisis sebagai variabel jenis kelamin |
| 3. | Tingkat pendidikan | Dipilih | Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan. Menurut Plumer (dalam Surotinojo, 2009), tingkat pendidikan dan buta huruf sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam hal | Dilebur menjadi faktor yang dianalisis sebagai |

| No. | Faktor | Keterangan | Justifikasi | Verifikasi |
|-----|--------------------------------------|------------|--|--|
| | Buta Huruf | | keinginan serta kemampuannya untuk ikut berpartisipasi. Faktor ini juga berpengaruh dalam masyarakat memahami dan melaksanakan bentuk partisipasinya. | variabel pendidikan |
| 4. | Pengetahuan dan Keahlian | Dipilih | Menurut Plumer (dalam Surotinojo, 2009), pengetahuan dan keahlian akan membuat masyarakat memahami akan tahap pembangunan dan bentuk partisipasi yang diberikan, begitupun sebaliknya apabila masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan keahlian maka mereka tidak memiliki pemahaman mengenai tahap pembangunan dan bentuk partisipasi yang ada | Dipilih menjadi faktor yang dianalisis sebagai variabel pengetahuan dan keahlian |
| 5. | Jenis pekerjaan | Dipilih | Jenis pekerjaan berkaitan terhadap waktu luang yang dimiliki oleh seseorang. Budiharjo (1991) dalam Surotinojo (2009) menyatakan apabila masyarakat sudah disibukkan oleh pekerjaannya, maka mereka akan kurang tertarik untuk menghadiri pertemuan dan sebagainya. | Dipilih menjadi faktor yang dianalisis sebagai variabel pekerjaan |
| 6. | Tingkat pendapatan | Dipilih | Menurut Slamet (1994) dalam Chaerunnissa (2014), tingkat pendapatan cukup erat hubungannya dengan partisipasi masyarakat, karena banyak dari masyarakat yang berpenghasilan besar memilih untuk berpartisipasi dalam bentuk uang dibanding melakukan kerja fisik. Sementara masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, lebih memilih berpartisipasi dalam bentuk tenaga dibandingkan uang. | Dipilih menjadi faktor yang dianalisis sebagai variabel pendapatan |
| 7. | Kepercayaan terhadap budaya tertentu | Dipilih | Menurut Plumer (dalam Surotinojo, 2009), apabila tingkat heterogenitas dari masyarakat tinggi terutama dalam hal agama, suku, dan budaya akan mempengaruhi partisipasi masyarakat, | Dilebur menjadi faktor yang dianalisis sebagai variabel |
| | Suku | | | |

| No. | Faktor | Keterangan | Justifikasi | Verifikasi |
|-----|------------------------------------|------------|---|--|
| | Agama | | karena sering terjadi pertentangan antara kepercayaan dengan konsep pembangunan. | budaya dan kepercayaan |
| 8. | Jarak rumah dengan lokasi kegiatan | Dipilih | Menurut Cohen, J. and Uphoff (1977) dalam Nurbaiti dan Bambang (2017) jarak rumah dengan lokasi kegiatan akan mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi. Individu yang memiliki jarak rumah dekat dengan lokasi cenderung berpartisipasi dibandingkan yang jarak rumahnya jauh. | Dipilih menjadi faktor yang dianalisis sebagai variabel jarak |
| 9. | Lama tinggal | Dipilih | Menurut Mulya, et al. (2016), faktor ini dianggap mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pembangunan. Faktor ini akan menjadikan seseorang lebih adaptif dan cepat terpanggil untuk berpartisipasi dalam perubahan yang terjadi di desanya. Semakin lama seseorang tinggal akan memperluas pemahaman dan wawasannya terkait nilai dan norma yang berlaku di desa tersebut. | Dipilih menjadi faktor yang dianalisis sebagai variabel lamanya tinggal |
| 10. | Peran Pemerintah | Dipilih | Menurut Surotinojo (2009), peran pemerintah masih cukup penting untuk mengarahkan dan mendampingi masyarakat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan. | Dipilih menjadi faktor yang dianalisis sebagai variabel peran pemerintah |
| 11. | Tokoh masyarakat | Dipilih | Menurut Surotinojo (2009), faktor peran tokoh masyarakat mempengaruhi pada bentuk partisipasi, kehadiran dan keaktifan berdiskusi dalam pertemuan, dalam mengikuti kegiatan kerja bakti dan dalam pemeliharaan prasarana. | Dipilih menjadi faktor yang dianalisis sebagai variabel peran tokoh masyarakat |
| 12. | Pengurus desa/dusun | Dipilih | Menurut Surotinojo (2009), peran pengurus desa/dusun mempengaruhi seluruh bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat yaitu mempengaruhi bentuk partisipasi masyarakat, sumbangan pikiran, kehadiran dan keaktifan berdiskusi dalam pertemuan, | Dipilih menjadi faktor yang dianalisis sebagai variabel peran |

| No. | Faktor | Keterangan | Justifikasi | Verifikasi |
|-----|---------------------------|------------|---|---|
| | | | keaktifan dalam mengikuti kegiatan kerja bakti dan keaktifan dalam pemeliharaan prasarana. | pengurus desa/dusun |
| 13. | Konsultan/ fasilitator | Dipilih | Menurut Surotinojo (2009), peran konsultan/TFL berpengaruh dalam mendorong masyarakat untuk menghadiri pertemuan yang dilaksanakan. | Dipilih menjadi faktor yang dianalisis sebagai variabel peran konsultan/fasilitator |

Sumber: Peneliti, 2020

2.3.3 Penetapan Variabel

Tahap terakhir pada sintesa penelitian ini adalah penetapan variabel. Berdasarkan tabel di atas maka didapatkan variabel yang akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program PAMSIMAS. Berikut adalah tabel faktor yang ditetapkan untuk digunakan dalam penelitian.

TABEL II.5
PENETEPAN VARIABEL FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PROGRAM PAMSIMAS

| Jenis Faktor | Faktor | Sub-Faktor | Pertanyaan | Jenis Data | Item |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|------------|---|
| Variabel Faktor | | | | | |
| Internal | 1. Usia | Kelompok usia | Berapakah usia anda? | Ordinal | a. 15-19 tahun b. 20-24 tahun c. 25-29 tahun d. 30-34 tahun e. 35-39 tahun f. 40-44 tahun g. 45-49 tahun h. 50-54 tahun i. 55-59 tahun j. 60-64 tahun k. > 65 tahun |
| | 2. Jenis Kelamin | Jenis Kelamin | Apa jenis kelamin anda? | Nominal | a. Laki-laki b. Perempuan |
| | 3. Pendidikan | Tingkat pendidikan | Apa pendidikan terakhir anda? | Ordinal | a. Belum pernah sekolah b. Belum tamat SD c. SD d. SMP e. SMA f. Diploma g. Sarjana |
| | | Buta Huruf | Apa anda buta huruf? | Nominal | a. Ya b. Tidak |

| Jenis Faktor | Faktor | Sub-Faktor | Pertanyaan | Jenis Data | Item |
|------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|--|
| Variabel Faktor | | | | | |
| | 4. Pengetahuan dan keahlian | Pengetahuan | Apakah anda memiliki pengetahuan mengenai tahapan pembangunan PAMSIMAS? | Nominal | a. Ya b. Tidak |
| | | Keahlian | Apakah anda memiliki keahlian dalam pembangunan dan pemeliharaan PAMSIMAS? | Nominal | a. Ya b. Tidak |
| | 5. Pekerjaan | Status Pekerjaan | Apakah anda memiliki pekerjaan? | Nominal | a. Ya b. Tidak |
| | | Jenis Pekerjaan | Apakah pekerjaan anda? | Nominal | a. Pelajar/mahasiswa b. Pegawai swasta c. PNS d. Wirausaha e. Ibu Rumah Tangga f. Buruh |
| | 6. Pendapatan | Penghasilan | Berapa penghasilan anda per bulan? | Nominal | a. Di bawah UMR ($\leq 2,2$ jt) b. Di atas UMR ($> 2,2$ jt) |
| | 7. Budaya dan kepercayaan | Suku | Apa jenis suku anda? | Nominal | a. Suku Lampung b. Suku Jawa c. Suku Sunda d. Suku Batak e. Suku Bali f. Suku lainnya |
| | | Agama | Apa agama anda? | Nominal | a. Islam b. Hindu c. Budha d. Protestan e. Katholik |

| Jenis Faktor | Faktor | Sub-Faktor | Pertanyaan | Jenis Data | Item |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|------------|--|
| Variabel Faktor | | | | | |
| | 8. Jarak | Jarak rumah ke lokasi PAMSIMAS | Berapa jarak rumah anda dengan PAMSIMAS? | Ordinal | a. Dekat b. Sedang c. Jauh d. Sangat Jauh |
| | 9. Lamanya Tinggal | Lama tinggal di daerah tersebut | Sudah berapa lama anda tinggal di daerah ini? | Nominal | a. ≤ 6 bulan b. > 6 bulan |
| Eksternal | 10. Peran Pemerintah Daerah | Peran Pemerintah Daerah | Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program ini? | Ordinal | a. Sangat bagus b. Bagus c. Kurang bagus d. Tidak bagus |
| | 11. Tokoh Masyarakat | Peran Tokoh Masyarakat | Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program ini? | Ordinal | a. Sangat bagus b. Bagus c. Kurang bagus d. Tidak bagus |
| | 12. Pengurus Desa/Dusun | Peran Pengurus Desa/Dusun | Bagaimana peran pengurus desa/dusun dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program ini? | Ordinal | a. Sangat bagus b. Bagus c. Kurang bagus d. Tidak bagus |
| | 13. Konsultan/fasilitator | Peran Konsultan/fasilitator | Bagaimana peran konsultan/fasilitator dalam memberikan penjelasan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi? | Ordinal | a. Sangat bagus b. Bagus c. Kurang bagus d. Tidak bagus |

Sumber: Peneliti, 2020